

Isu-isu Administrasi Publik di Era Post-Covid

**Ertien Rining Nawangsari
Bagus Nuari Harmawan, dkk.**



3

Isu-isu Administrasi Publik di Era Post-Covid

Penulis : Rumsari Hadi Sumarto, Romel Krismanto Malensang, Caesar Demas Edwinarta, Aries Samudra Wicaksono, Octa Dwi Sofian, Febri Herdiansyah Rahmaddhana, Ardian Rizki Serda Ginata, M. Zaenul Muttaqin, Bagus Nuari Harmawan, Wasisto Raharjo Jati, Oktarizka Reviandani, Vidya Imanuari Pertiwi, Bayu Priambodo, Singgih Manggalou, Indira Arundinasari, Muhammad Ali Mustofa, Muhammad Roisul Umam, Mashudi, Luluk Fauziah, Dul Muid, Diana Hertati, Yusuf Hariyoko, Dida Rahmdanik, Endang indartuti, Teguh Santoso, Theodorus Agustinus Hasiholan, Rafif Pamenang Imawan, Bayu Mardinta Kurniawan, Novy Setia Yunas, Luluk Fauziah, Mashudi dan Anafil Windriya, Dandi Darmadi, Anggie Parawitha Lucca, Adoniati Meyria Widaningtyas, Windu Darajat, Azmi Sahid Fillah, Sofia Al Farizi, Dewi Setyowati.

3

ISBN : 978-623-329-872-8

Copyright © Mei 2022

Ukuran: 15.5 cm x 23 cm; Hal: vi + 378

Isi merupakan tanggung jawab penulis.

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak baik sebagian ataupun keseluruhan isi buku dengan cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit.

Desainer sampul : An Nuha Zarkasyi

Penata isi : An Nuha Zarkasyi

Cetakan 1, Juni 2022

Diterbitkan, dicetak, dan didistribusikan oleh

CV. Literasi Nusantara Abadi

Perumahan Puncak Joyo Agung Residence Kav. B11 Merjosari

Kecamatan Lowokwaru Kota Malang

Telp : +6285887254603, +6285841411519

Email: penerbitlitnus@gmail.com

Web: www.penerbitlitnus.co.id

Anggota IKAPI No. 209/JTI/2018

PRAKATA

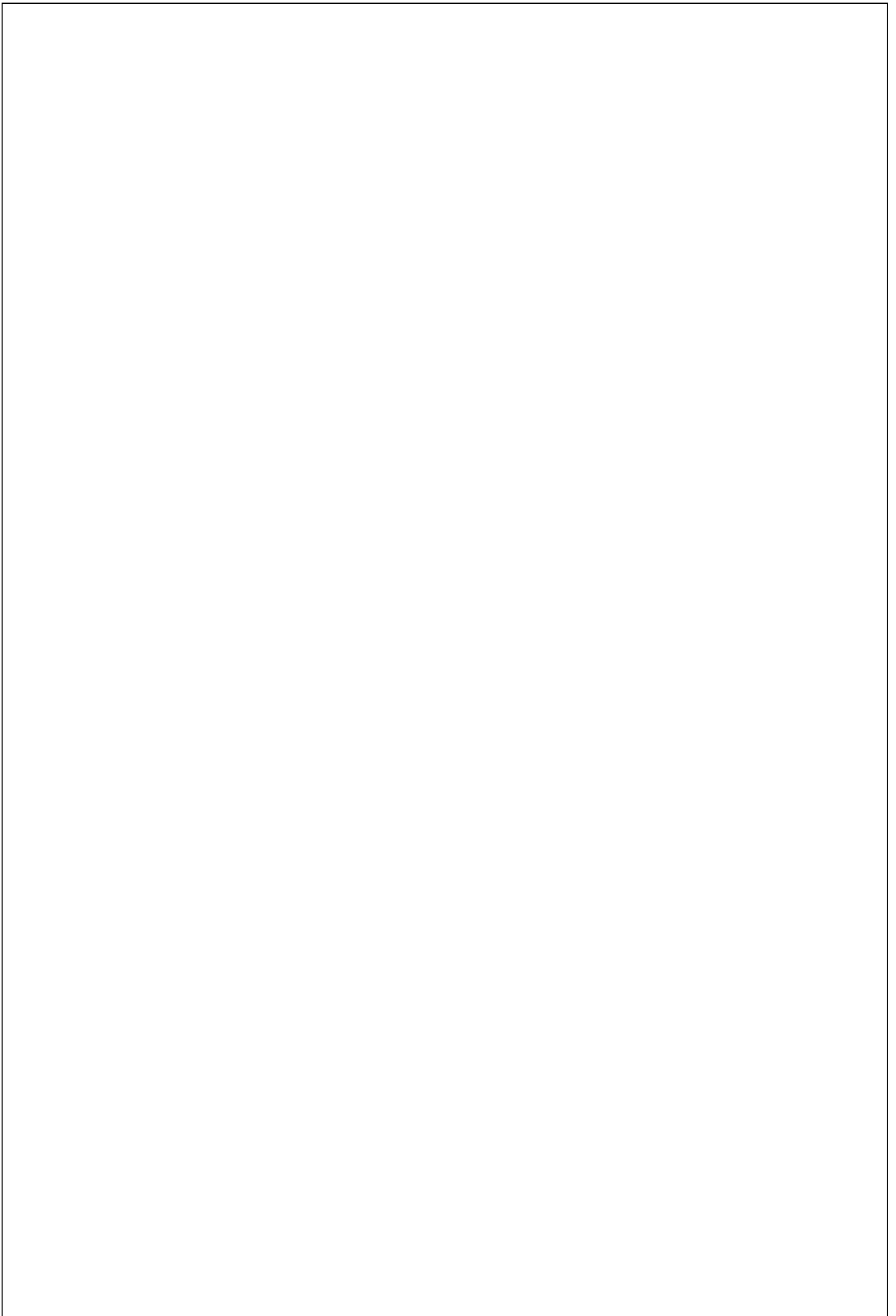
Kami bersyukur atas terbitnya buku ini setelah melalui proses seleksi naskah awal dari para penulis baik dari lingkungan UPN Veteran Jawa Timur maupun dari berbagai instansi lain. Tentu saja buku ini tidak akan bisa terwujud tanpa bantuan dari berbagai pihak yang telah berkontribusi dalam bentuk karya maupun saat proses penerbitan mulai dari awal hingga akhir. Kami ingin mengucapkan terimakasih kepada Koorprodi Administrasi Publik FISIP, UPN “Veteran Jawa Timur Dr Ertien Rining Nawangsari M.Si yang telah menginisiasi *call of book chapter* “Isu-Isu Administrasi Publik di Era Pos-Covid.”

Tidak lupa, apresiasi juga diberikan kepada seluruh anggota tim panitia seleksi *call of book chapter*. Panitia dengan penuh semangat telah berkontribusi dalam mempromosikan, menyeleksi setiap naskah yang masuk hingga mengkompilasi draft tulisan.

Akhir kata penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada pihak penerbit Literasi Nusantara yang telah memberikan kesempatan untuk menerbitkan buku ini. Sebagai penutup, apresiasi juga patut diberikan kepada jajaran dekanat FISIP UPN “Veteran Jawa Timur”, para kolega dosen FISIP UPN Veteran Jawa Timur karena turut memberikan inspirasi serta dukungan dalam penerbitan buku.

Surabaya, 22 Mei 2022

Bagus Nuari Harmawan



Daftar Isi

Prakata	iii
Daftar Isi	vii
Prolog.....	1

Potret Inovasi dalam Kebijakan Publik

1. Inovasi Dalam <i>Governance</i> Pada Pengembangan Pariwisata Di Kampung Wisata Kota Yogyakarta Di Masa Pandemi <i>Rumsari Hadi Sumarto</i>	9
2. Keimigrasian di Masa Pandemi: Dinamika Kebijakan dan Inovasi Birokrasi <i>Romel Krismanto Malensang</i>	33
3. Inovasi Pelayanan Paspor Di Tengah Pandemi: Studi Implementasi Kebijakan <i>M-Paspor</i> Pada Kantor Imigrasi Tanjung Perak <i>Caesar Demas Edwinarta</i>	47
4. Inovasi Kebijakan Perizinan Investasi Pariwisata Di Indonesia Pada Era <i>Post-Covid</i> <i>Aries Samudra Wicaksono</i> <i>Octa Dwi Sofian</i> <i>Febri Herdiansyah Rahmaddhana</i>	69
5. Kebijakan Bebas Karantina Pariwisata Di Indonesia Dari Perspektif <i>Adaptive Governance</i> Pasca Pandemi Covid-19 <i>Ardian Rizki Serda Ginata</i>	93

Turbulensi Pengelolaan Dunia Pendidikan dan Riset

1. Neoliberalisme dan Gejolak Pengelolaan Perguruan Tinggi di Masa Pandemi Covid-19 <i>M. Zaenul Muttaqin dan Bagus Nuari Harmawan</i>	113
2. Dilema Liberalisasi Atau Independensi Penelitian Di Indonesia: Brin Dan Tantangan Kebijakan & Inovasi Riset Paska Pandemi <i>Wasisto Raharjo Jati</i>	129

3. Optimalisasi Pembelajaran Online Pada Anak Usia Dini di Masa Pandemi Covid-19
Oktarizka Reviandani dan Vidya Imanuari Pertiwi 147
4. Efektifitas Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan Bagi Masyarakat Miskin Dalam Mengakses Pendidikan Di Era Pandemi
Bayu Priambodo, Singgih Manggalou, Indira Arundinasari 155

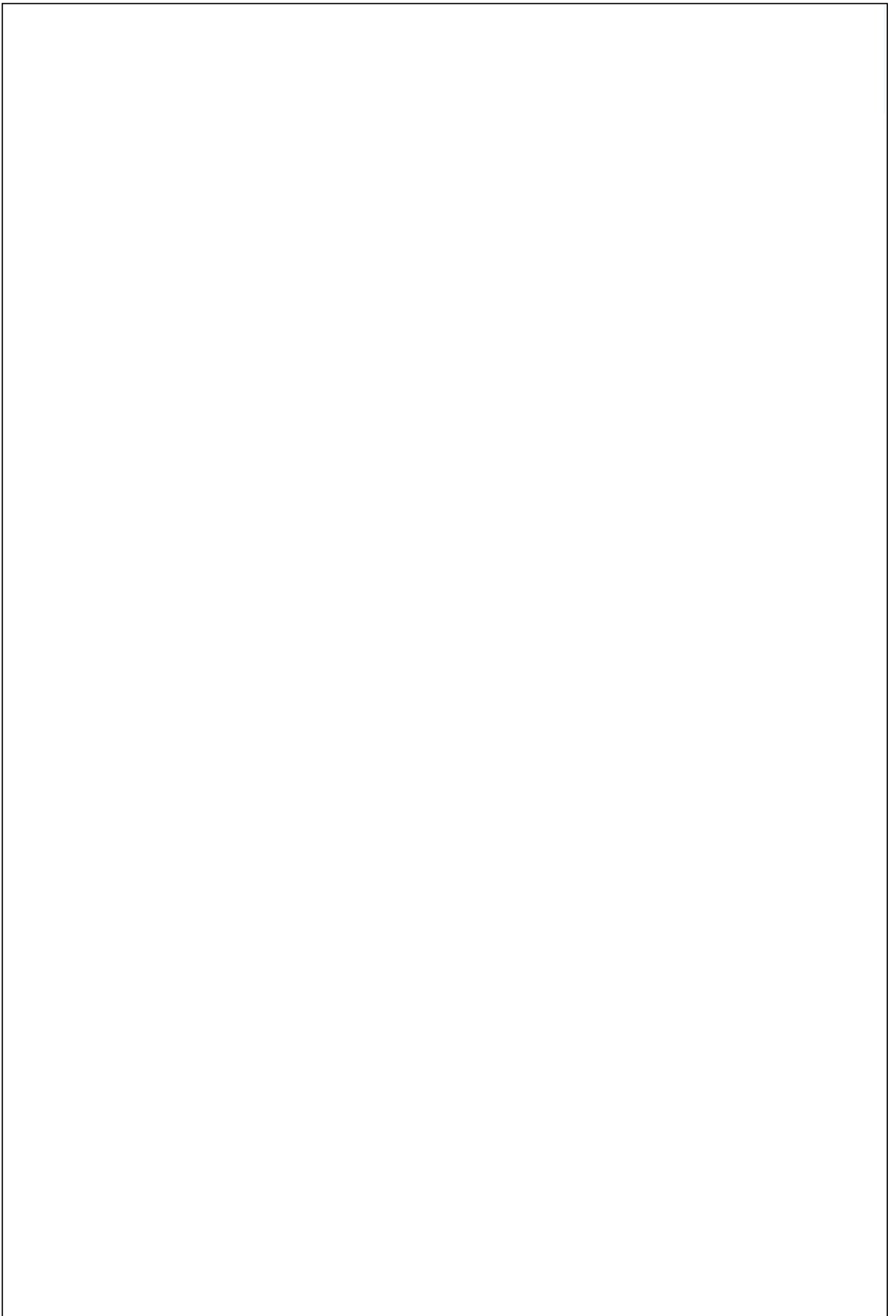
Governansi dan Problem Tata Kelola Pemerintahan

1. Refocussing Dan Realokasi Anggaran: Sebuah Upaya Dalam Pemulihan Ekonomi Dan Mendorong Inovasi Pemerintah Daerah Pada Masa Pandemi Covid-19
Muhammad Ali Mustofa & Muhammad Roisul Umam 173
2. Kepemimpinan Sektor Publik Dalam Manajemen Logistik Di Era Post-Covid
Mashudi, Luluk Fauziah, Dul Muid 189
3. Pemetaan Problematika Pemberian Bantuan Sosial Di Era Pandemi Covid-19 Di Indonesia
Dr. Diana Hertati, MSi 209
4. Pemberdayaan Tenaga Kerja Wanita Luar Negeri Purna Dalam Meningkatkan Kemandirian Ekonomi
Ertien Rining Nawangsari dan Arimurti Kriswibowo 219

Inovasi Birokrasi dan Pelayanan Publik

1. Digitalisasi Desa: Pemikiran Tentang Penerapan Teknologi Untuk Pelayanan Dan Pembuatan Kebijakan Tingkat Desa
Yusuf Hariyoko, Dida Rahmdanik, Endang indartuti, Teguh Santoso 233
2. Pengarusutamaan Prinsip Keterbukaan Pemerintah (*Open Government*) dan Kokreasi dalam Mendorong Tata Kelola Pemerintahan yang Baik pasca Pandemi COVID-19
Theodorus Agustinus Hasiholan 247
3. Gerak Adaptif Birokrasi : Studi pemetaan inovasi-inovasi birokrasi selama pandemi COVID-19 di Indonesia
Rafif Pamenang Imawan dan Bayu Mardinta Kurniawan 267

4.	<i>Triple Disruption</i> Dan Upaya Percepatan Reformasi Birokrasi Di Indonesia <i>Novy Setia Yunas</i>	289
5.	<i>Collaborative Governance</i> Antar Stakeholder Dalam Distribusi Logistik Pelayanan Penanganan Korban Kekerasan Berprespektif Gender Di Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur <i>Luluk Fauziah, Mashudi dan Anafil Windriya</i>	303
6.	Peningkatan <i>Social Awerness</i> Produsen dan Konsumen terhadap Produk Halal di Indonesia Pasca Pandemi <i>Dandi Darmadi dan Anggie Parawitha Lucca</i>	325
7.	Inovasi Rompi Penganti Siaga, Maksimalisasi Siaga Bencana Era Post Covid Bagi Penyandang Disabilitas Netra <i>Adoniati Meyria Widaningtyas, Windu Darajat dan Azmi Sahid Fillah</i>	341
8.	Telehealth dan Solusi Pelayanan Kesehatan di Masa Pandemi <i>Sofia Al Farizi</i> <i>Dr. Dewi Setyowati</i>	361





Prolog

Jalan Keluar Dari Administrasi Publik Untuk Pandemi

Bagus Nuari Harmawan & Ertien Rining Nawangsari

Penyebaran covid-19 yang begitu cepat memberikan dampak yang besar bagi perkembangan praktis administrasi publik yang terdiri atas dimensi birokrasi, kebijakan publik hingga sektor publik. Pada ruang lingkup *governance*, pandemi covid-19 memaksa pemerintah harus memiliki kapasitas dan mekanisme kerja yang dinamis (Mazzucato & Kattel, 2020). Pemerintah diharuskan untuk cepat belajar dan tanggap dalam merespon penyebaran penyakit covid-19 yang begitu cepat. Lebih lanjut, pemerintah diharuskan untuk meningkatkan kapasitasnya agar pelayanan publik tetap berjalan dan mampu dinikmati seluruh warga negara secara maksimal. Selain itu, guncangan akibat pandemi juga memaksa para pengelola pemerintahan agar dapat memanfaatkan data dan platform berbasis digital.

Salah satu jalan yang ditempuh oleh pemerintah dalam menghadapi pandemi adalah melakukan inovasi pada sektor publik. Langkah inovasi dilakukan untuk menghadapi situasi yang tidak terduga terjadi sebagai akibat dari serangan covid-19 (Hossain & Yasmin, 2022). Beragam inovasi dilakukan mulai dari pemerintah pada jenjang pemerintah pusat, provinsi hingga pemerintahan di tingkat lokal. Inovasi yang dilakukan pemerintah dapat berbentuk pemanfaatan teknologi informasi seperti *smart city* dalam meminimalisir dampak covid-19 (Harmawan & Farizi, 2020). Selain itu, pemerintah juga melakukan pengelolaan data yang terbuka untuk mencatat perkembangan kasus covid-19 yang menyebar di berbagai wilayah (Francesco Scotti, Francesco Pierri & Flori, 2022). Inovasi tidak hanya pada wilayah yang besar, pada ruang publik yang lebih kecil di tingkat desa juga bermunculan. Bentuk inovasi yang ada di tingkat desa seperti inovasi untuk distribusi bantuan sosial, membentuk

relawan desa hingga memanfaatkan teknologi untuk komunikasi antar relawan dalam merespon pandemi (Susilo et al., 2021).

Pandemi yang mengagetkan penduduk global memberikan pembelajaran kepada seluruh pemerintahan di dunia. Para pejabat perumus dan implementor kebijakan mendapatkan pembelajaran sekaligus pengalaman penting bagaimana secara sigap harus merespon pandemi melalui kebijakan publik (Goyal & Howlett, 2021). Kebijakan publik dituntut untuk melakukan tiga fase penting sebagai akibat dari pandemi covid-19 yaitu upaya normalisasi, adaptasi dan akselerasi (Capano et al., 2022). Fase normalisasi dilakukan sebagai respon atas realitas bahwa covid-19 akan hidup bersama masyarakat dalam jangka waktu yang lama. Pada kondisi ini tentu kebijakan publik harus berupaya untuk melakukan langkah-langkah taktis untuk menetralsisir serta memunculkan kenormalan baru di seluruh sektor mulai dari pendidikan, ekonomi, kesehatan, ketenagakerjaan hingga transportasi umum. Proses Adaptasi dilakukan oleh para aktor kebijakan untuk menyesuaikan produk kebijakan dengan fenomena-fenomena baru yang muncul sebagai akibat dari pandemi yang terus berlangsung. Kemudian, fase “akselerasi” diwujudkan dalam sebuah ide dan praktik kerja kebijakan yang responsif dalam menyikapi perubahan yang terjadi sebagai dampak dari pandemi.

Berdasarkan perkembangan praktis dan teoritik diatas, buku ini hadir sebagai sebuah produk akademik yang memotret beragam isu-isu pada lingkup administrasi publik dari awal hingga era post covid-19. Buku ini hadir dari inisiatif Program Studi Administrasi Publik FISIP UPN “Veteran” Jawa Timur dengan melakukan kolaborasi bersama para penulis yang memiliki latar belakang yang beragam dan berasal dari berbagai institusi mulai dari perguruan tinggi hingga lembaga pemikiran atau *think tank*. Kami berharap buku ini dapat berkontribusi dalam memotret beragam fenomena terkait administrasi publik seperti guncangan yang dihadapi instituis akibat pandemi, inovasi pelayanan publik hingga ragam kebijakan yang dikeluarkan dari awal hingga pasca pandemi.

Buku ini terdiri atas 4 bagian yang didalamnya terdapat 21 artikel. Pada bagian pertama, buku ini menampilkan potret inovasi kebijakan yang dilakukan selama dan paska pandemi covid-19. Beberapa tulisan pada bagian ini membahas beberapa contoh kebijakan di sektor imigrasi

seperti “Keimigrasian di Masa Pandemi: Dinamika Kebijakan dan Inovasi Birokrasi ” dan “Inovasi Pelayanan Paspor di Tengah Pandemi: Studi Implementasi Kebijakan M-Paspor Pada Kantor Imigrasi Tanjung Perak.” Selain itu, terdapat beberapa artikel yang membahas tentang kebijakan sektor pariwisata seperti “Inovasi dalam *Governance* Pada Pengembangan Pariwisata di Kampung Wisata Kota Yogyakarta di Masa Pandemi,” “Inovasi Kebijakan Perizinan Investasi Pariwisata di Indonesia Pada Era Post-Covid ” serta “Kebijakan Bebas Karantina Pariwisata di Indonesia dari Perspektif Adaptive Governance Pasca Pandemi Covid-19.”

Bagian kedua menampilkan potret turbulensi pengelolaan dunia Pendidikan dan riset. Terdapat beberapa artikel yang membahas persoalan seperti pengelolaan Pendidikan tinggi yang selama ini menerapkan asas neoliberalisme diguncang oleh pandemi. Kemudian digambarkan pula bagaimana lembaga BRIN menghadapi tantangan dunia riset paska pandemi. Artikel ketiga menulis bagaimana adaptasi pembelajaran pada anak usia dini yang dilakukan dengan menggunakan sarana online selama masa pandemi. Pada bagian ini di tutup dengan artikel yang membahas tentang bantuan sosial yang diberikan kepada keluarga miskin dalam mengakses pendidikan selama penyebaran covid-19. Untuk bagian ketiga, menampilkan isu-isu *governance* atau tata kelola pemerintah serta problem yang terjadi selama dan pasca pandemi. Beberapa isu yang dibahas dalam bagian ini seperti isu anggaran, kepemimpinan sektor publik, bantuan sosial hingga isu pemberdayaan tenaga kerja perempuan.

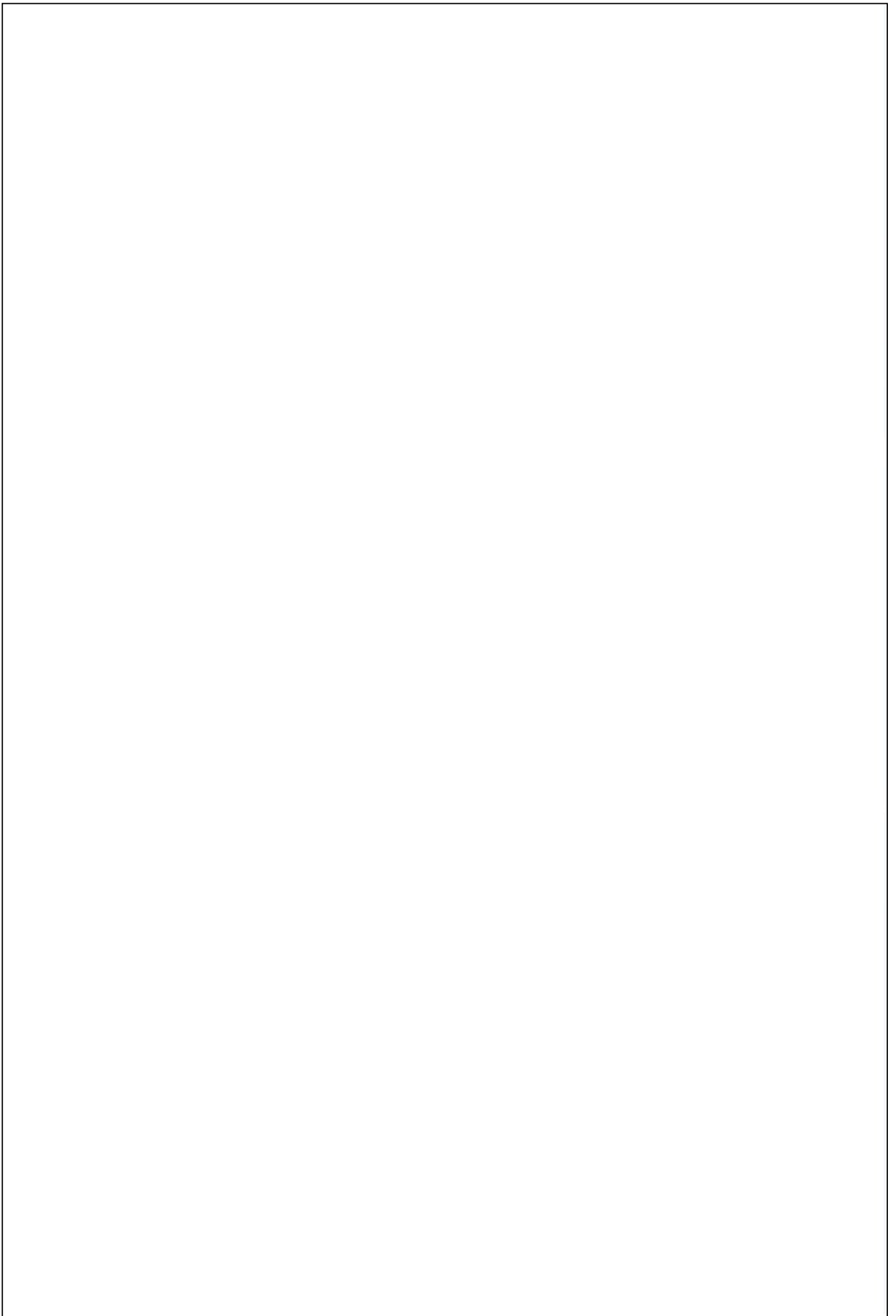
Pada bagian ke empat menampilkan berbagai inovasi yang dilakukan dalam konteks birokrasi dan pelayanan publik. Beberapa artikel menampilkan ragam inovasi birokrasi seperti digitalisasi di tingkat desa, penerapan *open government*, *collaborative governance* hingga inovasi berbasis *telehealth* sebagai salah satu bentuk inovasi pelayanan publik di sektor kesehatan selama pandemi. Lebih lanjut, terdapat artikel yang membahas “*peningkatan social awerness* produsen dan konsumen terhadap produk halal di indonesia pasca pandemi hingga inovasi berbentuk Rompi Penganti Siaga yang digunakan oleh para penyandang disabilitas tuna netras dalam merespon pandemi covid-19.

Kami berharap buku ini dapat berkontribusi dalam menampilkan respon pemerintah sekaligus problem yang terjadi di ruang publik dan terangkum dalam kajian administrasi publik ketika menyikapi pandemi covid-19 dari awal hingga paska pandemi. Semoga kajian yang terangkum dalam buku ini memberikan wawasan sekaligus pembelajaran bagi pembuat kebijakan, birokrat, akademisi hingga warga negara secara umum dalam menyikapi sebuah fenomena yang tidak pernah terduga sebelumnya.

Daftar Pustaka

- Capano, G., Howlett, M., Jarvis, D. S. L., & Ramesh, M. (2022). Long-term policy impacts of the coronavirus: normalization, adaptation, and acceleration in the post-COVID state. *Policy and Society*, 41(1), 1–12. <https://doi.org/10.1093/polsoc/puab018>
- Francesco Scotti, Francesco Pierri, G. B., & Flori, A. (2022). Responsiveness of open innovation to COVID- 19 pandemic : The case of data for good. *PLoS ONE*, 17(4), 1–19. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0267100>
- Goyal, N., & Howlett, M. (2021). “Measuring the Mix” of Policy Responses to COVID-19: Comparative Policy Analysis Using Topic Modelling. *Journal of Comparative Policy Analysis: Research and Practice*, 23(2), 250–261. <https://doi.org/10.1080/13876988.2021.1880872>
- Harmawan, B. N., & Farizi, S. Al. (2020). Kota Cerdas di Era Pandemi : Inovasi Smart Kampung Banyuwangi Menyambut New Normal. In Indri Dwi Apriliyanti (Ed.), *Optimisme Melampaui Musibah Pandemi (Antisipasi Kebijakan Publik Pasca Pandemi)* (Issue December). Pusat Kajian Manajemen dan Kebijakan Publik FISIPOL UGM.
- Hossain, M. Z., & Yasmin, T. (2022). Factors affecting public sector innovation during COVID-19 pandemic in Bangladesh: an analysis on three cases. *International Review of Public Administration*, 27(1), 1–14. <https://doi.org/10.1080/12294659.2022.2044105>
- Mazzucato, M., & Kattel, R. (2020). COVID-19 and public-sector capacity. *Oxford Review of Economic Policy*, 36(822781), S256–S269. <https://doi.org/10.1093/oxrep/graa031>

Susilo, D., Hidayat, E., & Marta, R. F. (2021). Village public innovations during COVID19 pandemic in rural areas: Phenomena in Madura, Indonesia. *Cogent Social Sciences*, 7(1). <https://doi.org/10.1080/23311886.2021.1905919>





PEMETAAN PROBLEMATIKA PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL DI ERA PANDEMI COVID-19 DI INDONESIA

Oleh

Dr. Diana Hertati, MSi

Dosen Adm. Publik FISIP UPN “Veteran” Jatim

Email : diana_hertati.adneg@upnjatim.ac.id

Abstrak

Ditengah terjadinya pandemi Covid-19 ini semakin banyak bertambahnya jumlah masyarakat miskin. Program Bantuan Sosial merupakan salah satu program bantuan yang dikeluarkan oleh pemerintahan untuk membantu masyarakat yang berpenghasilan rendah serta masyarakat yang terdampak adanya pandemi Covid-19 ini yang diberikan Kementerian Sosial Republik Indonesia. Kebijakan pemerintah ini memberikan pengaruh kepada masyarakat, terutama akibat kebijakan lockdown atau PSBB (pembatasan sosial berskala besar). Jutaan warga di Indonesia banyak mengalami kehilangan mata pencaharian sebagai penghasilan mereka, baik pedagang, ojek online, tukang bangunan, pekerja serabutan dan para pekerja yang berpenghasilan menengah ke bawah. Karenanya kebijakan lockdown yang diterapkan oleh pemerintah ini membawa konsekuensi bahwa pemerintah harus memfasilitasi segala kebutuhan pangan mereka. Pemerintah memastikan bahwa setiap warga masyarakat memperoleh kebutuhan pangan mereka dengan harga terjangkau, khususnya bagi lapisan masyarakat yang berpenghasilan menengah ke bawah. Kebijakan PSBB yang diterapkan pemerintah harus bisa memberikan kepastian bagi para pekerja yang berpenghasilan menengah ke bawah dan jutaan rakyat miskin yang ada di Indonesia. Pemberian bantuan sosial tersebut sudah dilakukan selama beberapa bulan tetapi terkesan masih membingungkan, lambat diterima oleh masyarakat dan tidak tepat sasaran. Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan mengenai 1) Peta problematika Jenis BANSOS Pemerintah Selama Masa Pandemi Covid 19; 2) Program Keluarga Harapan (PKH); dan 3) Bantuan Kartu Sembako untuk Wilayah Provinsi Jawa Timur. Artikel ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif berbasis studi literatur, yaitu metode riset yang berorientasi pada pengumpulan data sekunder dari berbagai sumber untuk dikembangkan menjadi suatu pengetahuan baru baik dari kajian literatur, jurnal, artikel dan buku.

Kata Kunci : Problematika, Bantuan Sosial, COVID-19, Pemerintah Indonesia.

Pendahuluan

Pada awal tahun 2020 seluruh belahan dunia dihebohkan dengan kejadian luar biasa, karena sebuah virus corona disease 2019. yang pertama kali dideteksi kemunculannya di Wuhan Tiongkok Cina, (Hopson et al., 2020). WHO menetapkan wabah virus corona sebagai pandemi global setelah 114 negara dan menyebabkan 4.291 orang meninggal dunia (Nugroho et al., 2020). Perkembangan kasus terkonfirmasi di seluruh dunia berdasarkan data WHO di tahun 2019, terus mengalami lonjakan yang cukup tinggi. seperti terlihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 1. Jumlah Peningkatan Kasus Terkonfirmasi VirusCorona Disease 2019 Berdasarkan Data WHO

No.	Negara	Kematian
1	Amerika Serikat	13.725.652
2	Asia Tenggara	4.449.788
3	Eropa	4.353.514
4	Mediterania Timur	1.967.073
5	Afrika	1.066.906
6	Pacific Barat	508.325
	Jumlah	26.121.999

Sumber : WHO, Tahun 2020 diolah penulis

Sedangkan kasus terinfeksi virus corona di Indonesia, diumumkan pertama kali pada 2 Maret 2020, diketahui bahwa pasien pertama di Indonesia ada 2 (dua) orang, yaitu Ibu dan anaknya yang tinggal di daerah Depok, Jawa Barat (<https://nasional.kompas.com/read/2020/03/03/06314981/fakta-lengkap-kasus-pertama-virus-corona-di-indonesia?page=all>). Kemudian dengan peristiwa itu, jumlah pasien yang positif terinfeksi covid terus bertambah.

Sebagai upaya untuk mengatasi penyebaran virus, pemerintah menetapkan beberapa kebijakan, antara lain menetapkan wabah virus COVID-19 ini sebagai bencana nasional melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran corona virus disease 2019 (COVID-19) sebagai bencana nasional dan melalui Peraturan Menteri Kesehatan

(Permenkes) Nomor 9 tahun 2020 tentang Pedoman PSBB, menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk daerah-daerah yang termasuk ke dalam zona merah (Pardiyanto, 2020).

Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) menimbulkan dampak yang cukup signifikan terhadap kelangsungan kehidupan masyarakat, karena interaksi sosial masyarakat dibatasi sehingga berdampak terganggunya aktivitas ekonomi, masyarakat tidak dapat melakukan pekerjaan harian, dan banyaknya gelombang PHK oleh perusahaan serta meningkatkan angka kriminalitas akibat penurunan penghasilan tersebut. Sebagai bentuk tanggung jawab negara kepada masyarakat, pemerintah menetapkan kebijakan memberikan bantuan sosial untuk mengantisipasi semua permasalahan sosial ekonomi terkait COVID-19. Namun ditataran pelaksanaan sikap pemerintah cenderung lamban dan kurang tegas dalam membuat kebijakan, Regulasi dan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah banyak yang tidak harmonis dan sejalan dengan masyarakat sehingga menimbulkan problematika baru bagi masyarakat yang sedang panik akibat wabah covid 19 ini. Belum lagi masyarakat diwajibkan dan harus taat kepada kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, tetapi di tataran pelaksanaan kebijakan yang dikeluarkan tidak sinkron antara pemerintah pusat dan daerah sehingga menimbulkan ambiguitas dari masyarakat, karena kebijakan yang dikeluarkan tidak satu pintu. Ditambah juga dengan tidak terkoordinasinya dengan baik dalam penanggulangan covid, misalnya terkait kebijakan PSBB.

Kebijakan pemerintah pusat meminta daerah sebagai daerah siaga Covid-19, memberikan penyuluhan tentang bahaya covid-19 kepada warga masyarakat dan mempersiapkan dana talangan sosial bagi masyarakat. Namun ditataran pelaksanaannya terjadi kesimpangsiuran kebijakan baik terkait dana yang harus dikeluarkan untuk bantuan sosial, proses penyaluran bantuan sosial tersebut.

Kajian Teoritis dan Penelitian yang Relevan

1. Program Bantuan Sosial Pemerintah di Indonesia

Program bantuan sosial adalah bentuk bantuan sebagai usaha dari pemerintah guna memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat miskin atau masyarakat yang berada di kelompok rentan akan terhadap resiko-resiko sosial untuk meringankan anggota

masyarakat yang tidak mampu dan terlantar agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya sehingga dapat mempertahankan bahkan mengembangkan dirinya sebagai manusia (A.F & Nulhaqim, 2021). Program bantuan sosial merupakan bantuan yang sifatnya sementara yang diberikan kepada masyarakat miskin, dengan tujuan agar mereka dapat meningkatkan kehidupannya secara wajar. Program bantuan sosial sebagai bentuk realisasi tanggung jawab pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang sangat peduli terhadap kondisi masyarakat miskin dan terlantar di tingkat bawah, sebagai implementasi Undang- Undang Dasar 1945 Pasal 34 ayat 1 yang menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Pasal 34 ayat 2 juga menyebutkan bahwa negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Sedangkan Kesejahteraan Sosial diatur dengan Undang- Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial disahkan Presiden Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono di Jakarta pada tanggal 16 Januari 2009 yang mulai berlaku sejak diundangkan pada tanggal 16 Januari 2009 oleh Menkumham Andi Mattalatta dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12 (Firdausu, 2021).

2. Implementasi Kebijakan Publik

Meter dan Horn dalam Suaib (2016:82) mendefinisikan implementasi kebijakan public sebagai "*Policy implementation encompasses those actions by public and private individuals (and groups) that are directed at the achievement of goals and objectives set forth in prior policy decisions*". Implementasi kebijakan merupakan tindakan-tindakan yang dilaksanakan oleh individu-individu dan kelompok-kelompok pemerintah dan swasta, diarahkan pada pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini berusaha untuk mentransformasikan keputusan-keputusan menjadi pola-pola operasional untuk mencapai perubahan, baik yang besar maupun yang kecil, yang

diamanatkan oleh keputusan-keputusan kebijakan. Selanjutnya Ripley dan Franklin dalam Winarno (2012:148), Implementasi mencakup tindakan-tindakan oleh berbagai aktor, khususnya birokrat, yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan. Sementara itu Grindle dalam Winarno (2012:149) pandangannya tentang implementasi adalah membentuk suatu kaitan (*linkage*) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan dapat direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah. Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, implementasi kebijakan sebagai suatu kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan dibuat dan sebelum kebijakan tersebut di evaluasi. (Anggara, 2014:257)

3. Penelitian Relevan Terkait Bantuan Sosial di Indonesia

Beberapa penelitian terkait problematika penyaluran bantuan sosial baik dimasa pandemi COVID-19 maupun sebelum pandemic sudah banyak dilakukan. Mufida (2020) dalam artikelnya tentang “Polemik pemberian bantuan sosial di tengah pandemi COVID-19”, yang situs peneliti dilakukan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa banyaknya jenis bantuan sosial yang diberikan Pemerintah Pusat dengan alur birokrasi penyaluran bantuan sosial menyebabkan kekacauan sehingga masyarakat menjadi ambigu akan pintu bantuan sosial yang mereka dapat, pendataan yang belum tepat sasaran dan waktu penyaluran bansos yang tidak serentak. Kemudian Wildan Rahmansyah dkk, artikelnya yang berjudul Pemetaan Permasalahan Penyaluran Bantuan Sosial Untuk Penanganan Covid-19 Di Indonesia, dimana pembahasannya bahwa problematika penyaluran bantuan sosial adalah ketidakandalan basis data penerima bantuan sosial, semua bantuan sosial harus disalurkan segera dengan menggunakan data yang ada. Namun, data yang digunakan seringkali tidak akurat sehingga menimbulkan banyak permasalahan di lapangan Informasi dan pengetahuan tentang jenis-jenis dan syarat penerima bantuan sosial. Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah juga sangat diperlukan. Transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran bantuan sosial serta kesadaran masyarakat dalam memberikan informasi dan pembaruan data tentang dirinya dan tetangga sekitarnya menjadi hal yang penting dalam suksesnya penyaluran bantuan sosial di masa pandemic COVID-

19. Roy Morado dalam jurnalnya tentang Implementasi Penyaluran Bantuan Sosial Covid-19 Di Dki Jakarta juga membahas bahwa proses implementasi program bantuan sosial dalam memenuhi kebutuhan masyarakat rentan pada kementerian sosial sendiri senantiasa dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung maupun penghambat. Faktor pendukung dalam pelaksanaan program bantuan sosial ini meliputi integritas antar pelaksana, banyaknya dukungan publik, komitmen dari aparat pelaksana. Sedangkan faktor yang menjadi penghambat adalah simpang siurnya data penerima manfaat serta kualitas bahan sembako yang kurang baik sehingga terjadi untrust dari masyarakat terhadap bantuan sosial pemerintah tersebut.

Metode Penelitian

Kajian ini dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan (Library Research). Sumber data yang menjadi bahan akan penelitian ini berupa buku, jurnal dan situs internet yang terkait dengan topik yang telah dipilih. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan deskripsi yang kongkrit baik data dan kebijakan regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah. Untuk menjaga kekelan proses pengkajian dan mencegah serta mengatasi mis informasi yang bisa terjadi karena kekurangan penulis dalam mengeksplorasi studi Pustaka, maka dilakukan pengecekan antar pustaka dengan memperhatikan kaidah penulisan yang ditetapkan.

Analisis dan Pembahasan

1. Peta Problematika Penyaluran BANSOS Pemerintah Selama Masa Pandemi Covid 19

Melihat permasalahan BANSOS yang terjadi baik pada Pemerintah Pusat maupun daerah yang cukup banyak, terlihat dari kritik yang terjadi terkait proses penyaluran bantuan sosial. Kritik tersebut tidak hanya bersumber dari masyarakat, tetapi juga dari para Pejabat Pemerintah Pusat maupun Daerah karena adanya ketidaksinkronan data yang dimiliki Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memberikan kritik kepada Pemerintah Pusat dalam penyaluran bantuan sosial ini, data tidak terintegrasi di pemerintah pusat. Ketidaksinkronan data

menyebabkan adanya penolakan bantuan sosial di sejumlah kepala desa di Sukabumi Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Penolakan ini karena data yang tidak valid dan dinilai tumpang tindih dengan data warga yang terdaftar sebagai penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dari Pemerintah Pusat. Hal ini dapat menjadi *trigger* adanya kekacauan dalam penyaluran bantuan sosial, diantaranya Bansos Presiden, Bansos Provinsi, Bansos Kabupaten/Kota, hingga dana desa. Jenis bantuan sosial yang bervariasi inilah yang membuat masyarakat ambigu, apalagi bantuan yang datang tidak bersamaan (CNBC, 2020). Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa juga menyampaikan kritikan persoalan pendataan. Pemerintah seharusnya memperbarui kualifikasi data penerima BANSOS. Sementara data yang digunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kemensos yang verifikasi data terakhir dilakukan padatahun 2015, dipastikan banyak data penerima yang berubah seiring berjalannya waktu (Rahmansyah et al., 2020).

Terjadinya ambigu masyarakat tentang adanya penetapan kebijakan antara Surat Edaran Nomor 8 tahun 2020 dari Menteri Desa dan Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2020 dari menteri dalam negeri berbeda. Dalam Surat Edaran Menteri Desa Nomor 8 tahun 2020 tentang Desa Tanggap COVID-19 dan Penegasan Padat Karya Tuna Desa (PKTD) yaitu terkait dana senilai 8,1 milyar yang dialokasikan untuk padat karya desa dan bukan untuk dana sosial, sedangkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 memerintahkan Bupati kepada Kepala Desa untuk menggeser dana padat karya desa digunakan untuk bantuan sosial covid-19 dan masalah sosial. Selanjutnya beberapaminggu kemudian terbit Surat Edaran Menteri Desa Nomor 11 tahun 2020 yang isinya memperkuat Surat Edaran Nomor 8 tahun 2020 tentang padat karya dan dana desa yang bisa digunakan untuk BLT (Bantuan langsung tunai), tetapi terjadi ambigu pada kriteria BLT tersebut, dalam poin 1 ada kriteria miskin tetapi bukan karena dampak covid-19 tetapi dijelaskan orang yang tinggal di rumah beralaskan tanah dan berdinding bambu, tidak ada listrik karena itu merupakan problematika. Sedangkan pada poin 7 ada yang tidak boleh menerima bantuan BLT dari dana desa yaitu yang menerima bantuan dari pemerintah kabupaten, provinsi

dan pusat, dll (dan lain-lain), seharusnya kalimat dll tidak boleh digunakan karena memiliki pengertian yang rancu dan tidak jelas.

2. Program Keluarga Harapan (PKH)

Bantuan sosial dalam bentuk Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu JPS untuk keluarga pra sejahtera dengan tujuan memperkuat daya beli dan meningkatkan konsumsi masyarakat serta menjaga pendapatan dan pengeluaran keluarga pra sejahtera agar terhindar dari resiko sosial selama pandemi Covid-19 berlangsung (Kementerian Sosial, 2020). Selama terjadinya pandemic covid 19, penyaluran PKH mengalami kenaikan sebesar 25% dari 9.2 juta

keluarga penerima manfaat (KPM) meningkat pertambahannya menjadi 10 juta KPM. Bantuan sosial program PKH disalurkan per triwulan yaitu pada bulan Januari, April, Juli, dan Oktober, namun di saat pandemi diberikan setiap bulan dari April sampai Desember 2020. Bantuan ditransfer kepada Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) seperti Bank Mandiri, BNI, BRI, dan BTN. Sedangkan peserta PKH yang tidak mempunyai rekening Bank Himbara, bantuan dapat diambil di e-warung atau agen bank (Noerkaisar, 2021). Banyak permasalahan yang terjadi dalam penyaluran bantuan sosial PKH di masa pandemi ini. Rahmansyah et al. (2020) mengelaborasi permasalahan yang terjadi di lapangan seperti penerima bantuan PKH yang sudah meninggal dunia, pindah domisili, menikah di usia muda, cerai, putus sekolah, dan adanya perubahan status yang tidak sesuai dengan ketentuan penerima bantuan. Ketidaktepatan sasaran penerima PKH tersebut dikarenakan database yang tidak akurat yang tidak terupdate secara rutin (<https://tenggulangbaru.id/artikel/2020/5/6/asal-usul-data-penerima-bantuan-pkh>, diakses 2 April 2022). Selain itu juga ditemukan adanya permasalahan terkait pemalsuan data kriteria penerima PKH oleh pendamping, aparat berwenang, maupun petugas bank penyalur bantuan dilingkungan penerima PKH yang berakibat dana bantuan diterima oleh oknum yang bukan penerima manfaat (Wahyuni, 2021).

3. Bantuan Kartu Sembako untuk Wilayah Jawa Timur

Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak mengemukakan, terdapat 3,8 keluarga penerima kartu sembako/BPNT yang memperoleh

maksimal Rp 200 ribu per bulan. Selanjutnya, ada sebanyak 1,4 juta di luar dari 3,8 juta tersebut memperoleh Rp 600 ribu per bulan selama 3 bulan, dan berlanjut sampai Desember Rp 300 ribu per bulan. Permasalahan yang terjadi dalam bantuan sembako ini antara lain masih adanya penyaluran BANSOS yang kurang efektif. Termasuk BANSOS untuk penanganan Covid-19 dari pemerintah pusat. Pasalnya, data Nomor Induk Kependudukan (NIK) dari penerima BANSOS tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Banyak NIK yang masuk ke data penerima bansos, tetapi ketika di cek NIK-nya tidak ada di database, lalini kemungkinan terjadi salah ketik. Sehingga kemungkinan besar akan terjadi salah sasaran dalam pemberian BANSOS tersebut. Pemprov Jatim bersama dengan KPK, BPKP, dan Kejaksaan Agung tengah menyusun data penerima bansos yang tepat sasaran. Nantinya data ini bisa dipertanggungjawabkan, karena berbasis kartu keluarga (KK). Kalau misalnya keluarga ini bisa kita identifikasi, kita bisa tahu apakah di satu KK ini ada bantuan yang tumpang tindih. Ini banyak sekali. Karena bantuan tentunya tidak unlimited, maka kita prioritaskan pada keluarga yang belum pernah mendapatkan,” tandasnya. (<https://ekbis.sindonews.com/read/131034/33/jujur-emil-dardak-akui-ada-masalah-dalam-penyaluran-bansos-di-jatim-1597212492>).

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemetaan terhadap literatur, jurnal dan berita serta informasi terkait permasalahan penyaluran bantuan sosial di masa pandemic COVID-19, adalah terjadinya kekisruhan dalam pemberian bantuan sosial, dapat diselesaikan apabila satu pintu dan satu

waktu. Selama tidak satu pintu dan tidak satu waktu maka mengakibatkan perspektif yang berbeda dan tidak sama. Langkah yang diambil pemerintah pusat dalam menanggulangi Covid masih belum terkoordinasi dan belum sinkron dengan baik antara pemerintah daerah. Sistem regulasi yang baik dan jelas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat diterapkan secara efektif, apabila para penegak hukum dan pemerintah memiliki integritas tinggi serta masyarakat menaati kebijakan tersebut, hal ini akan menjadi barometer yang bagus bagi Indonesia di masa mendatang

Daftar Pustaka

- A.F, K. F., & Nulhaqim, S. A. (2021). Analisis Konflik Distribusi Bantuan Sosial Covid-19 Dan Strategi Penyelesaian Konflik Di Kota Bandung. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*. <https://doi.org/10.24198/jkrk.v3i1.31974>
- Anggara, S. D. M. S. (2014). *Kebijakan Publik* (1st ed.). CV. Pustaka Setia.
- Firdausu, A. Z. (2021). Penyaluran Bantuan Dana Jaminan Sosial bagi Masyarakat yang Terdampak Covid-19. *Open Science*.
- Hopson, R., George, C., Khin, S., & Russi, T. (2020). Submassive Pulmonary Embolism In Covid-19 Infection: True Incidence Or Coincidence? *Chest*. <https://doi.org/10.1016/j.chest.2020.08.2126>
- Noerkaisar, N. (2021). Efektivitas Penyaluran Bantuan Sosial Pemerintah untuk Mengatasi Dampak Covid-19 di Indonesia. *Jurnal Manajemen Perbendaharaan*. <https://doi.org/10.33105/jmp.v2i1.363>
- Nugroho, W. D., C, W. I., Alanish, S. T., Istiqomah, N., & Cahyasari, I. (2020). Literature Review :
Transmisi Covid-19 dari Manusia ke Manusia Di Asia. *Jurnal of Bionursing*.
- Pardiyanto, M. A. (2020). Kebijakan Pemerintah Dalam Upaya Pencegahan Wabah Covid 19. *Spektrum*.
- Rahmansyah, W., Qadri, R. A., Sakti, R. R. A., & Ikhsan, S. (2020). Pemetaan Permasalahan Penyaluran Bantuan Sosial Untuk Penanganan Covid-19 Di Indonesia. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v2i1.995>
- Suaib, M. R. (2016). *Pengantar Kebijakan Publik: dari Administrasi Negara, Kebijakan Publik, Administrasi Publik, Pelayanan Publik, Good Governance, hingga Implementasi Kebijakan Publik*. Calpulis.
- Wahyuni, D. (2021). Permasalahan Penyaluran Bantuan Sosial dalam Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat. *Bidang Kesejahteraan Sosial*.
- Winarno, B. (2012). *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus: Edisi dan Revisi Terbaru*. Center for Academic Publishing Service.

Isu Isu Administrasi Publik Di Era Post-Covid

ORIGINALITY REPORT

6%

SIMILARITY INDEX

6%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

repository.unair.ac.id

Internet Source

4%

2

www.researchgate.net

Internet Source

1%

3

repository.upnjatim.ac.id

Internet Source

1%

4

jurnal.kemendagri.go.id

Internet Source

1%

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 1%